

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib H. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. I No. 1. Tahun. 2010.1-9.
- Arikunto S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azizah A dan Purwoko B. 2017. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif". *Jurnal Bimbingan dan Konseling*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. 2019. *Panduan Penulisan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief)*. Jawa Timur: Bidang Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Indonesia . 2021. *Statistik Air Bersih*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2022. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar (Jiwa), 2022*. Makassar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2019. *Statistik Air Bersih Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Baidowi A. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Pendidikan*. ISSN-Online: 2721-2106 Vol. I No. II. 84-102.
- Darwis. 2018. *Pengelolaan Air Tanah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pena Indis.
- Dasawisma PKK Kota Makassar. 2023. Profile Kecamatan Biringkanaya. Makassar.
- Gubernur Sulawesi Selatan. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang NPA.
- Gunawan I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Edisi I. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Semarang: Widya Karya.
- Harsono & Hanifah. 2006. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Irawati, E dkk. 2017. *Modul Pelatihan Lanjutan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).
- Islamy, I. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Kota Makassar. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah.
- Kridawati. 2011. *Realitas Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Lembaga Administrasi Negara. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan.
- Makhya, S dan Mukhlis, M. 2021. "Pendampingan Identifikasi Isu Kebijakan Dan Penyusunan Policy Brief Bagi Pejabat Eselon Iii Pemerintah Kabupaten Way Kanan". *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Vol. VI, No. II. 351-361.
- Makkasau, Andi F. 2019. Dari Gilingkanaya menjadi Biringkanaya. Makassar: Palontaraq.
- Mamonto, N., dkk. 2018. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan

Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. I No. I. 1-10.

Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Deskripsi Kota Makassar. Makassar: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Tanah.

Purwanto, dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Raharja, Ivan F. 2014. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”. Vol. II, No. II. 117-137.

Ramdhani, A dan Ali, R. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*. Vol. XI No. 1. 1-12.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sumber Daya Alam.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. 2002. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Edisi I. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab, S. A. 2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahyudi, A. 2016. Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik

Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.  
2(2),101-105.